



LAPORAN KINERJA BALMON KELAS II JAYAPURA

Balai Monitoring Kelas II Jayapura
2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI, secara Administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 tahun 2018 atas perubahan Permen Kominfo No. 15 tahun 2017.

Balai Monitor Kelas II Jayapura melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pembina, pengawas, dan pengendalian frekuensi radio di wilayah kerja Provinsi Papua yang terdiri dari 24 kabupaten /kota yang terdiri dari 23 kabupaten dan 1 kota.

Balai Monitor Kelas II Jayapura telah melaksanakan kegiatan – kegiatan yang meliputi pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring pengguna spektrum frekuensi radio, evaluasi pengukuran dan validasi data, serta melaksanakan penertiban pengguna spektrum frekuensi radio sehingga tercipta keamanan pengguna spektrum frekuensi radio pengguna tanpa adanya intervensi atau gangguan. Disamping itu, Balai Monitor Kelas II Jayapura juga melaksanakan fungsi penyusunan rencana dan program kerja, pemeliharaan serta perbaikan perangkat pendukung monitoring juga melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan administrasi kerumah tanggaan.

Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	83,33%	104,16%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	54,55%	155,84%
		3. Persentase (%) jumlah aduan / klaim yang dapat diselesaikan	94%	100 %	106,38 %
		4. Persentase (%) kepatuhan	85%	100 %	117,85 %

		pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT			
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	285,14 %	352 %
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT	83%	90 %	108,43 %
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100 %	100 %
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100 %	100 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100%	100 %	100 %
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%	100 %	100 %

***Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)**

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitoring Kelas II Jayapura diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I **“Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio, ”** terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Dimonitor.

K-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Di Monitor Observasi dan monitoring merupakan kegiatan pengamatan kepadatan frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin, mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio tanpa ijin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengamatan dilakukan terhadap sekaligus penggunaan frekuensi radio penerbangan, navigasi, keamanan Negara dan lain-lain untuk kepentingan umum.

Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk: a. Untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu wilayah Papua; b. Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan Wilayah Papua; c. Mengetahui perilaku penggunaan atas kesesuaian, ketentuan teknis yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam ISR di wilayah Papua; d. Memonitor Penggunaan Frekuensi Marabahaya, Penerbangan dan Frekuensi Penting Lainnya Wilayah Papua.

Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran(Radio dan TV) Yang Terukur Sesuai Dengan Data ISR

Pada Tahun 2019, target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 35% jumlah Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur dari jumlah banyaknya Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) sesuai dengan data ISR yang ada di wilayah kerja UPT tersebut. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah menyusun rencana program kerja pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura untuk mencapai target sekurang-kurangnya 35% dari 60 stasiun penyiaran baik radio dan TV sesuai dengan ISR yang terdaftar pada data SIMS. Capaiannya untuk tahun 2019 telah mencapai sebesar 36,6% atau sebanyak 21 stasiun penyiaran baik radio dan televisi yang telah terukur dan sesuai dengan ISR.

Persentase (%) Jumlah Aduan / Klaim Yang Diselesaikan

Ditjen SDPPI telah menetapkan target sesuai dengan perjanjian kinerja 94% aduan/klaim yang diselesaikan. Pada tahun 2019, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura merencanakan 2 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Terdapat 1 aduan gangguan Frekuensi Radio dan telah diselesaikan yaitu gangguan BMKG Kab. Biak Numfor. Capaian telah mencapai 100 % untuk aduan/klaim yang diselesaikan.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2019, Ditjen SDPPI menargetkan 85 % kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Target ini diperoleh dari kegiatan operasi penertiban Frekuensi Radio dalam kota Jayapura dan operasi penertiban Frekuensi Radio luar kota. Tahun ini, kegiatan penertiban di Papua sebanyak 2 kegiatan dan tindak lanjut penertiban sebanyak 2 kegiatan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu di Kab. Jayawijaya dan Kota Jayapura dengan target operasi sejumlah 22 telah disegel 11 diperingatkan 22 dan dalam proses pengurusan izin sebanyak 12. Capaian target sebesar 100 % kepatuhan penggunaan frekuensi radio.

Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR

Tahun 2019, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mempunyai target 81% kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dari 350 ISR data sample sedangkan pada daftar rencana program kerja 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura merencanakan kegiatan Inspeksi data hasil validasi sebanyak 19 kali kegiatan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan inspeksi data hasil validasi sebanyak 19 dengan data yang diperoleh yaitu 1948 link yang terdiri dari 998 link sesuai ISR, 147 link tidak sesuai ISR, 120 link illegal 629 link dalam keadaan off air dan 54 link habis masa laku ISR. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR telah melebihi target kinerja yaitu 285,14% dengan hasil inspeksi 998 data inspeksi yang telah sesuai dari 350 ISR data sample.

Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Target untuk perjanjian kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di wilayah Papua yaitu 83%. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat. Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas II Jayapura juga melakukan inspeksi perangkat

SMFR transportable di empat lokasi yaitu di site Sentani di Kabupaten Jayapura, site Nabire di Kabupaten Nabire Site Wamena di Kabupaten Jayawijaya dan site Biak di Kabupaten Biak Numfor. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT tercapai sesuai target.

Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan posisi Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan pendistribusian SPP, ST dan ISR di wilayah Papua SPP sebanyak 144 , ST sebanyak 86 dan ISR sebanyak 10 Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 100%.

Persentase (%) Terlaksananya UNAR

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menetapkan target 100% terlaksananya UNAR. Sesuai dengan rencana program kerja tahun 2019 Balai Monitor spektrum Frekuensi radio Kelas II Jayapura merencanakan 2 kali kegiatan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dan sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan UNAR sebanyak 2 kali yaitu di Kabupaten Jayapura, dengan total peserta 207 terdiri dari Siaga sejumlah 190, Penggalang sejumlah 15 dan Penegak sejumlah 2, dan di Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari Siaga sejumlah 102 Penggalang sejumlah 24 dan Penegak sejumlah 7 dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Pada Sasaran Program II **“Terwujudnya tata kelola UPT Monitor spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif”** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2019, dilakukan 3 kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura yaitu pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini sebagai dasar bagi Balai Monitor Spektrum frekuensi Radio Kelas II Jayapura untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Papua.

Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Selain melaksanakan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura juga melaksanakan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura merencanakan pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 3 kali dan telah dilaksanakan dengan jumlah SPP BHP tertunggak yang menjadi Piutang dan dilimpahkan ke KPKNL sampai dengan tahun 2019 sebanyak 31 penyerahan berkas, telah dibayarkan lunas sebanyak 15 Wajib Bayar, Proses PSBDT sebanyak 12 Wajib Bayar, dan sisanya sebanyak 4 berkas Piutang sedang ditangani oleh pihak KPKNL berkas piutang Wajib Bayar dengan demikian maka capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tercapai 100%

Persentase (%) Layanan Administrasi Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

Demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

A. Perencanaan

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu awal dalam DIPA Rp. 8.590.042.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3.855.203.000,- dan PNBPN sebesar Rp. 4.734.839.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program Kegiatan	Pagu	Target
3053.017	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balmon Kelas II Jayapura	Rp. 1.008.408.000,-	28 Layanan
3053.054	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Kelas II Jayapura	Rp. 62.456.000,-	2 Layanan
3053.078	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 1.896.290.000,-	1 Layanan
3053.951	Layanan internal (overhead)	Rp. 221.365.500,-	1 Layanan
3053.994	Layanan perkantoran	Rp. 5.401.523.000,-	1 layanan

B. Ketatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota Papua serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 451 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 438 surat dan Surat Perintah Tugas sebanyak 170 surat.

Rumah Tangga

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 14 kontrak dengan nilai Pengadaan 50 Juta – 200 Juta.

C. Kepegawaian

Pada Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Jayapura memiliki sumber daya manusia sejumlah 17 pegawai ASN, 16 pegawai Non ASN dan 2 CPNS.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 1 pegawai, golongan III sejumlah 13 pegawai dan golongan II sejumlah 4 pegawai.

Pada tahun 2019 terdapat 3 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 6 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 2 pegawai, S1 sejumlah 11 pegawai, D3 sejumlah 2 pegawai dan SMA sejumlah 4 pegawai.

D. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura berjumlah sebesar posisi Desember 2019 adalah terserap sebesar Rp 8.083.521.097,- dari pagu Rp. 8.590.042.000,- atau sebesar 94,10 %.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi Kanwil Jayapura dan 1 kali berupa revisi DJA.

KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua*



Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan seksi Pemantauan dan Penertiban, Seksi Sarana dan Pelayanan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jayapura, Mei 2020

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II
JAYAPURA**

**NIKOLAS, ST. MH.
NIP. 196811081989031003**

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	17
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	20
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
B. SASARAN PROGRAM	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	23
BAB III. AKUNTABILITAS	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO	26
1. IK-1 Persentas (%) Kabupaten / Kota Yang Dapat Di Monitor	26
2. IK-2 Persentas (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio/TV) Yang Terukur Sesuai ISR	30
3. IK-3 Persentas (%) Jumlah Aduan/ Klaim Yang Diselesaikan	33

4. IK-4 Persentas (%) Kebutuhan Penggunaan Frekuensi Radio Di Wilayah UPT	35
5. IK-5 Persentas (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR	38
6. IK-6 Persentas (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitor/ Ukur UPT	41
7. IK-7 Persentas (%) Terdistribusinya SPP, ST Dan ISR Oleh UPT	42
8. IK-8 Persentas (%) Terlaksananya UNAR	42
 SASARAN 2. <i>TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF.</i>	44
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio	44
2. IK-2 Persentase (%) Layanan Administrasi Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	46
 B. PERENCANAAN DAN PROGRAM	47
1. Penatausahaan Dan Rumah Tangga	48
2. Kepegawaian	53
3. Pelaksanaan Anggaran	56
4. Pelaksanaan Anggaran	57
 BAB IV. PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

A

LATAR BELAKANG

Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut *frequency band*, dimana pada setiap *frequency band* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat kesegala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta sistem peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa setiap

penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang pengelolaannya berupa pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B**TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan

informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

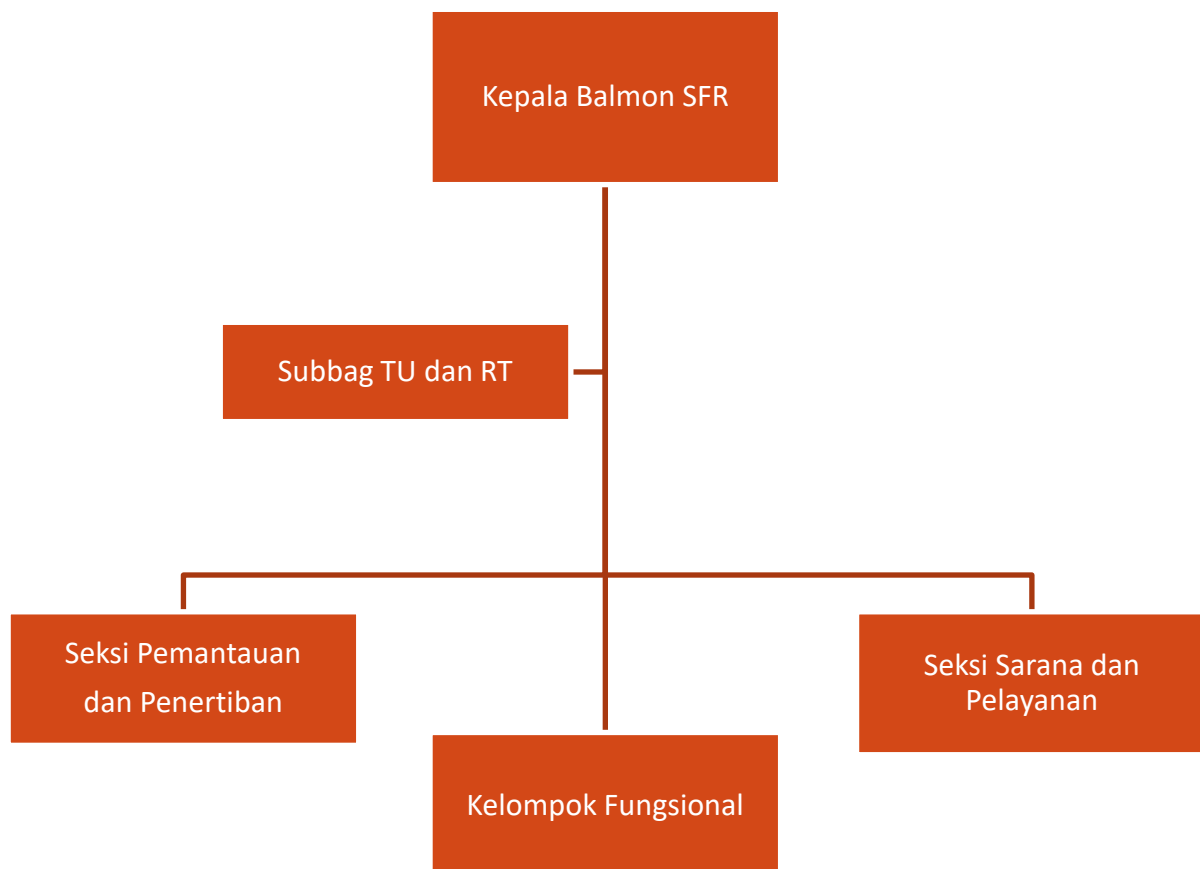
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Gambar Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura



C

POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Secara geografi, *Papua* berada pada $9^{\circ}20'$ - $0^{\circ}10'$ Lintang Selatan serta $134^{\circ}10'$ - $141^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan memiliki luas 808.105 km². Dari luas tersebut dibagi lagi menjadi empat batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudra Pasifik
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Arafuru
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Papua New Guinea
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Propinsi Papua Barat

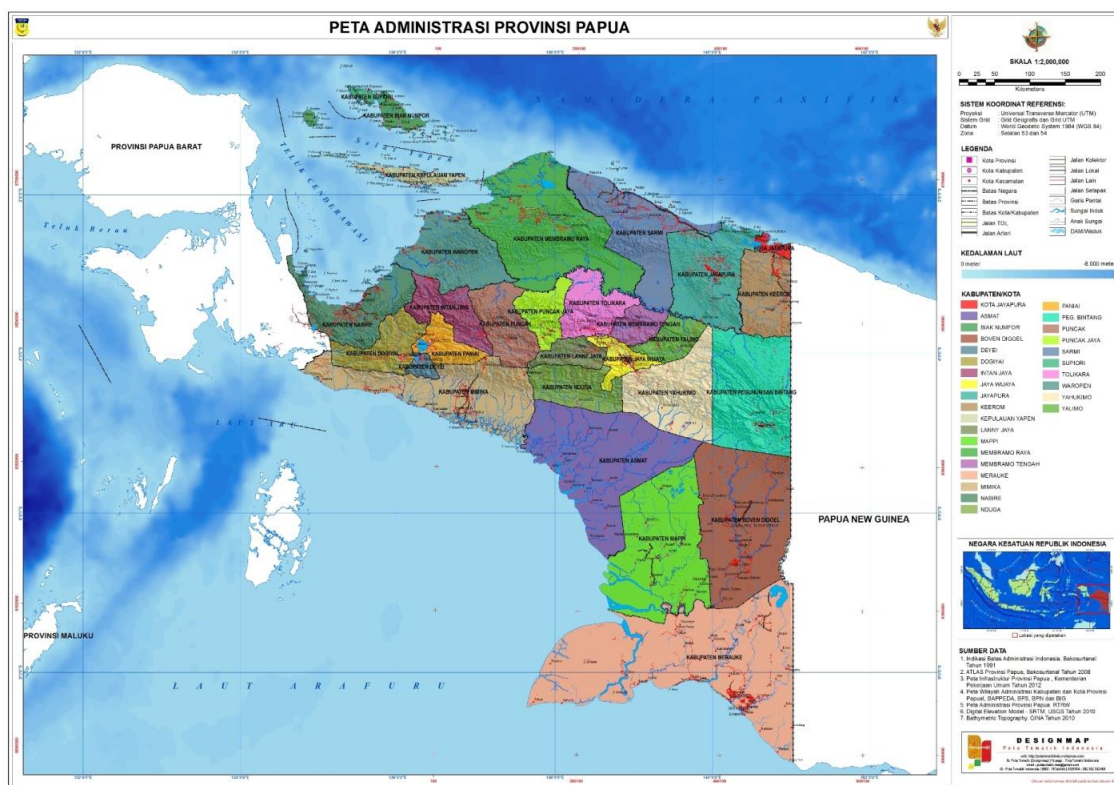
Papua adalah Provinsi terluas Indonesia yang terletak dibagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua (2) Provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua memiliki jumlah penduduk sebesar 3.265.202 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10,31 jiwa/km².

Papua dibagi kepada 29 kabupaten, 1 kota (dahulu kotamadya), 568 kecamatan, dan 5.317 kelurahan/desa, berikut tabel kabupaten/kota di Papua.

Daftar kabupaten/kota di Papua
(Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura)

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kota Jayapura	Jayapura
2	Kabupaten Jayapura	Sentani
3	Kabupaten Mimika	Timika
4	Kabupaten Nabire	Nabire
5	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
6	Kabupaten Biak Numfor	Biak
7	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
8	Kabupaten Kep. Yapen	Serui
9	Kabupaten Waropen	Waropen

10	Kabupaten Mamberamo Raya	Burmeso
11	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobagma
12	Kabupaten Yalimo	Elelim
13	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
14	Kabupaten Paniai	Enarotali
15	Kabupaten Deiyai	Tigi
16	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
17	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
18	Kabupaten Puncak	Ilaga
19	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia
20	Kabupaten Keerom	Waris
21	Kabupaten Sarmi	Sarmi
22	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
23	Kabupaten Nduga	Kenyam
24	Kabupaten Tolikara	Karubaga



Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung konektivitas nasional antara lain :

1. Sumber Daya Manusia Balmon Kelas II Jayapura dari sisi kuantitas perlu ditingkatkan dan dipacu dalam rangka peningkatan kemampuan (Hard Skill dan Soft Skill) guna mengikuti perkembangan teknologi Telekomunikasi nirkabel dan juga bertambahnya para pengguna telekomunikasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan - pelatihan baik teknis, administratif maupun dalam bidang hukum secara terus menerus dan berkesinambungan.
2. Wilayah kerja Balmon Kelas II Jayapura yang sangat luas terdiri dari 1 (satu) kota dan 23 (dua puluh tiga) kabupaten dan sebagian besar wilayah hanya dapat dijangkau dengan angkutan udara dengan jadwal penerbangan yang tidak menentu ini diakibatkan kondisi geografis Papua yang sebagian besar dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang cepat berubah-ubah sehingga mempengaruhi hasil kegiatan validasi, monitoring dan pengukuran dilaksanakan tidak tepat pada jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu diharapkan perlu peninjauan kembali tentang teknis penganggaran guna mencapai hasil maksimal kegiatan validasi, monitoring dan pengukuran di wilayah kabupaten dan kota.
3. Banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan Peredaran perangkat radio ilegal.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga diperlukan Sosialisasi kepada masyarakat.

D**SISTEMATIKA PELAPORAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A**RENCANA STRATEGIS**

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai peran dalam upaya optimalisasi pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga meningkatkan tertibnya para pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi yang harus tercipta sehingga masyarakat atau para pengguna telekomunikasi/pengguna frekuensi tidak saling mengganggu, tertib, lancar, aman dalam menggunakan alat/perangkat serta penggunaan spektrum frekuensi radio.

Sesuai Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

VISI

Terwujudnya penatakelolaan Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

MISI

1. Mewujudkan tatanan spektrum radio untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.
3. Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan dibidang SDPPI.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.
6. Mewujudkan kepastian hukum dibidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Ditjen SDPPI.

B**SASARAN PROGRAM..**

Sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio.*

Untuk mengukur kinerja tujuan pertama ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2019, yaitu:

- a. Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor
- b. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR
- c. Persentase (%) jumlah aduan/ klaim yang diselesaikan
- d. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT
- e. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR
- f. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT
- g. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT
- h. Persentase (%) terlaksananya UNAR

2. Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.

Untuk mengukur kinerja tujuan kedua ini maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan digunakan tahun 2019, yaitu:

- a. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio ;
- b. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

C

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Balmon Kelas II Jayapura tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran,	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%
		2. Persentase (%) stasiun radio	35%

	Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta penanganan Gangguan Frekuensi Radio	penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	
		3. Persentase (%) jumlah aduan / klaim yang dapat diselesaikan	94%
		4. Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring / ukur di UPT	83%
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfredrad yang bersih, efisien dan efektif.	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio.	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura adalah sebesar Rp. 8.590.042.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	83,33%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	45,89 %
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100 %
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	85%	100 %
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	285,14 %
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	83%	90 %
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100 %

		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100 %
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan pendampingan pengelolaan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100 %
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100 %

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/Kota Yang Dapat Di Monitor

Observasi dan monitoring merupakan kegiatan pengamatan kepadatan frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik HF, VHF, UHF maupun SHF secara rutin, mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio tanpa ijin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengamatan dilakukan terhadap sekaligus penggunaan frekuensi radio penerbangan, navigasi, keamanan Negara dan lain-lain untuk kepentingan umum. Observasi pendudukan pita frekuensi merupakan bagian dari kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk:

- Untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita sub-service tertentu wilayah Papua;
- Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan Wilayah Papua;
- Mengetahui perilaku penggunaan atas kesesuaian, ketentuan teknis yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam ISR di wilayah Papua;
- Memonitor Penggunaan Frekuensi Marabahaya, Penerbangan dan Frekuensi Penting Lainnya Wilayah Papua.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan monitoring yaitu:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 KHz – 1605,5 KHz.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Band dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

Berdasarkan target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 80% jumlah Kabupaten/Kota yang termonitor dari jumlah banyaknya Kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja UPT tersebut. Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terdapat 24 Kabupaten/Kota, artinya berdasarkan target yang diberikan Ditjen SDPPI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura harus memonitor paling sedikitnya 20 (Kabupaten/Kota) yang menjadi wilayah kerjanya agar terpenuhinya target 80% yang ditetapkan oleh Ditjen SDPPI.

Untuk mencapai sasaran target terpenuhinya 80% kabupaten/kota yang harus di monitor, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah memprogram kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio yang

tertuang dalam Anggaran Tahun 2019. Berikut Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2019.

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan
2	Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar Kota	18 Kegiatan

Tabel Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2018.

Berikut Realisasi Pencapaian Program Kerja Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio :

1. Dalam Kota

NO	LOKASI OBSMON	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kota Jayapura	14 s.d 19 Januari 2019

2. Luar Kota

NO	LOKASI OBSMON	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Kabupaten Jayapura	21 s.d 25 Januari 2019
2	Kabupaten Keerom	19 s.d 23 Februari 2019
3	Kabupaten Tolikara	05 s.d 09 Maret 2019
4	Kabupaten Lanny Jaya	05 s.d 09 Maret 2019
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	18 s.d 22 Maret 2019
6	Kabupaten Waropen	18 s.d 22 Maret 2019
7	Kabupaten Biak Numfor	04 s.d 08 April 2019
8	Kabupaten Mimika	27 April s.d 01 Mei 2019
9	Kabupaten Sarmi	18 s.d 22 Juni 2019
10	Kabupaten Nabire	05 s.d 09 Juli 2019
11	Kabupaten Jayawijaya	12 s.d 16 Agustus 2019
12	Kabupaten Supiori	12 s.d 16 Agustus 2019
13	Kabupaten Yalimo	29 Agustus s.d 02 September 2019
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	09 s.d 12 September 2019
15	Kabupaten Mamberamo Raya	10 s.d 14 September 2019
16	Kabupaten Dogiyai	17 s.d 20 September 2019
17	Kabupaten Paniai	17 s/d 23 September 2019
18	Kabupaten Deiyai	17 s/d 23 September 2019

Tabel Persentase (%) Kabupaten/Kota yang telah di Monitor

NO	Kabupaten/Kota di Papua	Telah dimonitor	Belum dimonitor
1	Kota Jayapura	√	
2	Kabupaten Jayapura	√	
3	Kabupaten Mimika	√	
4	Kabupaten Nabire	√	
5	Kabupaten Jayawijaya	√	
6	Kabupaten Biak Numfor	√	
7	Kabupaten Supiori	√	
8	Kabupaten Kepulauan Yapen	√	
9	Kabupaten Waropen	√	
10	Kabupaten Mamberamo Raya	√	
11	Kabupaten Mamberamo Tengah		√
12	Kabupaten Yalimo	√	
13	Kabupaten Dogiyai	√	
14	Kabupaten Paniai	√	
15	Kabupaten Deiyai	√	
16	Kabupaten Paniai	√	
17	Kabupaten Lanny Jaya	√	
18	Kabupaten Pegunungan Bintang	√	
19	Kabupaten Puncak		√
20	Kabupaten Puncak Jaya		√
21	Kabupaten Keerom	√	
22	Kabupaten Intan Jaya		√
23	Kabupaten Nduga		√
24	Kabupaten Tolikara	√	
Jumlah		19	5

Pelaksanaan kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di kabupaten/kota wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura meliputi Kegiatan Dalam Kota dan Luar Kota. Agar terpenuhinya target 80% kabupaten/kota yang di Monitor, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

Jayapura menyikapinya dengan melaksanakan beberapa Kegiatan Observasi dan Monitoring luar kota dengan memonitor dua kabupaten/kota yang berdekatan sekaligus dalam satu kegiatan, mengingat jumlah program yang terdapat dalam Anggaran tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Pelaksanaan kegiatan observasi dan monitoring telah memonitor 21 band pita frekuensi.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	79.16%	98.95%

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor” secara akumulasi sampai dengan Desember 2019 capaian telah tercapai 79.16% sedangkan target indikator kinerja yaitu 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 98.95%.

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio/TV) Yang Terukur Sesuai Dengan ISR.

Untuk mengetahui spesifikasi teknis dan karakteristik pancaran Stasiun Penyiaran (radio dan TV) dilakukan pengukuran frekuensi radio. Berdasarkan target yang ditetapkan Ditjen SDPPI terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) bahwa harus terpenuhinya 35% jumlah Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur dari jumlah banyaknya Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) sesuai dengan data ISR yang ada di wilayah kerja UPT tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura diperkirakan **60** Stasiun Penyiaran (Radio dan TV) berdasarkan data ISR

tahun 2019, artinya untuk mencapai target yang diberikan maksud dan tujuan pengukuran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah :

1. Mengetahui perilaku penggunaan atas kesesuaian ketentuan teknis yang berlaku dan yang telah ditetapkan dalam ISR dan IPFR di wilayah Papua.
2. Mengetahui jumlah pengguna frekuensi yang sesuai dengan ketentuan Izin Pita Frekuensi Radio dan Izin Stasiun Radio yang telah ditetapkan di wilayah Papua.
3. Melakukan pencocokan data antar frekuensi yang digunakan di lapangan dengan data yang ada di SIMS untuk wilayah Papua.
4. Tertibnya penggunaan spektrum frekuensi radio.

Untuk melaksanakan kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Penyiaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah memprogramkan kegiatan tersebut yang tertuang dalam Anggaran Tahun 2019. Berikut Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2019:

Tabel Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan
2	Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota	4 Kegiatan

Tabel Realisasi Pencapaian Program Pengukuran Frekuensi Radio

1. Dalam Kota

NO	LOKASI PENGUKURAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang diukur	KET
1	Kota Jayapura	19 s.d 23 Februari 2019	1 STN. Relay TV7 Jayapura	Radio Siaran
			2 RCTI	Radio Siaran
			3 Jaya TV	Radio Siaran
			4 Metro TV	Radio Siaran
			5 SCTV Jayapura	Radio Siaran
			6 TRANS TV	Radio Siaran
			7 Global TV Jayapura	Radio Siaran
			8 INDOSIAR	Radio Siaran

			9	ANTV	Radio Siaran
			10	RTV	Radio Siaran
			11	NET TV/ Sentani TV	Radio Siaran
			12	TVRI Jayapura	Radio Siaran
			13	Sindo TV / iNews Tv	Radio Siaran
			14	MNC TV Jayapura	Radio Siaran

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENGUKURAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang diukur		KET
1.	Kabupaten Jayapura	21 s.d 25 Januari 2019	1.	1. LPPL Kenambai Umbai	Radio Siaran
			2.	Radio Sobat FM	Radio Siaran
2.	Kabupaten Kepulauan Yapen	18 s.d 22 Maret 2019	1.	RRI Pro 1 Serui 96.4 MHz	Radio Siaran
			2.	RRI Pro 2 Serui 101.5 MHz	Radio Siaran
			3.	RRI Pro 3 Serui 94.8 MHz	Radio Siaran
3	Kabupaten Sarmi	18 s.d 22 Juni 2019	1.	NIHIL dikarenakan pada saat pelaksanaan pengukuran, perangkat milik RRI Sarmi dalam keadaan rusak.	NIHIL
4.	Kabupaten Nabire	05 s.d 09 Juli 2019	1.	RRI Pro 1 Nabire 97.6 MHz	Radio Siaran
			2.	RRI Pro 2 Nabire 90.1 MHz	Radio Siaran
			3.	LPP RRI 94.4 MHz	Radio Siaran
			4.	Radio Swameka 101.1 MHz	Radio Siaran
			5.	Nabire TV / iNews TV	TV siaran

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan Pengukuran Frekuensi Radio yang terbagi ke dalam kegiatan Pengukuran Dalam Kota dan Luar Kota.

Agar terpenuhinya target 35% jumlah Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menyikapinya dengan memetakan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) lebih banyak sebagai tujuan dilakukannya Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio.

Berdasarkan dari Tabel Realisasi Pencapaian Program Pengukuran Frekuensi Radio tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV)

yang terukur berjumlah 24 stasiun radio siaran dan tv dari 60 stasiun radio dan tv di wilayah Papua. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah menyelesaikan 40% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 114,28%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	40%	114,28%

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim Yang Diselesaikan

Penanganan gangguan frekuensi radio dilakukan berdasarkan aduan/klaim dari pengguna frekuensi radio, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna frekuensi radio, dengan melakukan monitoring, pengamatan dan mengidentifikasi sumber gangguan untuk dilakukan penanganan/penyelesaiannya.

Aduan/klaim dari pengguna frekuensi wajib dan segera diselesaikan, Ditjen SDPPI menetapkan target 94% penyelesaiannya dari jumlah aduan/klaim yang diterima UPT di wilayah kerjanya. Berikut Program kerja Penanganan Gangguan Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2019 :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	Tidak Ada
2	Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	3 Kegiatan

Tabel Program Kerja Pengukuran Frekuensi Radio pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2019

Tabel Realisasi Penanganan Gangguan Frekuensi Radio**1. Dalam Kota**

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kota Jayapura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENANGANAN GANGGUAN NAMA	PELAPOR	PELAKSANAAN KEGIATAN	KET
1	Kabupaten Biak Numfor	Radio Suara Kasih Oikumene Biak	04 s.d 08 April 2019	Clear
2	Kabupaten Sarmi	COSPAS - SARSAT	18 s.d 22 Juni 2019	Clear
3.	Kabupaten Jayapura	COSPAS - SARSAT	23 s.d 25 Oktober 2019	Clear

Agar terpenuhinya target 94% penyelesaian gangguan atas aduan / klaim dari pengguna frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menyikapinya dengan melaksanakan penyelesaian sesegera mungkin.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%)Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100%	106,38%

Indikator Kinerja Prosentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 94 %. Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mendapat aduan/klaim dari masyarakat pengguna frekuensi ilegal sejumlah 3 aduan, dari 3 aduan tersebut telah tertangani dengan hasil clear.

Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar **100% sedangkan target adalah 94% sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 106,38%.**

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Penggunaan Frekuensi Radio Di Wilayah UPT

Penertiban pengguna frekuensi radio merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Observasi dan monitoring terhadap pengguna frekuensi radio yang melanggar ketentuan.

Bagi pengguna frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan pendekatan persuasif, melalui edukasi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan surat peringatan. Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh pelanggar ketentuan akan dilakukan Operasi Penertiban berupa penyegelan atau penyitaan terhadap perangkat telekomunikasi yang di gunakan.

Operasi Penertiban dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya sehingga terwujud tertib pengguna frekuensi radio. Pada tahun 2019, Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Penertiban Pengguna Frekuensi Radio yang dilaksanakan meliputi Dalam Kota dan Luar Kota.

Tabel Program Kerja Operasi Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM KERJA
1	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota	1 Kegiatan
2	Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota	1 Kegiatan

Tabel Realisasi Kerja Operasi Penertiban Frekuensi Radio Tahun 2019

1. Dalam Kota

NO	LOKASI OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL PENERTIBAN	KETERANGAN
1	Kota Jayapura	25 s.d 29 Juni 2019	Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi an. EDDY SURJANTO	-Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 buah EXITER Radio FM berwarna Abu-Abu - Barang bukti diamankan ke Kantor Balmon SFR Kelas II Jayapura
			Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi Pemilik Rumah Makan an. TJHIONG INDRA	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 9 (Sembilan) unit HT belum ada ISR; - Barang bukti diamankan ke Kantor Balmon SFR Kelas II Jayapura.

2. Luar Kota

NO	LOKASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO	PELAKSANAAN KEGIATAN	HASIL PENERTIBAN	KETERANGAN
1	Kabupaten Mimika	25 s.d 29 Juni 2019	Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi an. HANS YAUNG (Hotel Horison Ultima Timika	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 2 HT dan 1 Charger.
			Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi an. Drs. DA Siahainemia (Radio Publik Mimika)	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (buah) STL Radio Siaran
			Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi an. Alfin F Wally (Radio Suara Kencana)	- Dilakukan Pembungkusan dan penyegelan barang bukti 1 (satu) buah Broadcast Transmitter
			Melakukan	- Dilakukan Pembungkusan

		Penertiban terhadap Target Operasi an. Dini W Ampiyen (PT Newangkawi Jaya)	dan penyegelan barang bukti 1 (satu) buah Transceiver (Radio Rig)
		Melakukan Penertiban terhadap Target Operasi an. Timotius (Hotel Grand Tembaga)	- Dilakukan Pembukusan dan penyegelan barang bukti 4 (empat) HT dan 4 (empat) Charger

Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target 85% kepatuhan pengguna frekuensi radio.

Setelah melaksanakan penertiban sejumlah 2 kali di Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika, terdapat hasil penertiban yang telah ditindaklanjuti memiliki Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT telah tercapai 100% dari 85% yang ditargetkan.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT	85%	100%	117,65%

Capaian Indikator Kinerja dimaksud juga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Papua

Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi		Tindak Lanjut		Keterangan
		Peringatan	Segel	Pengurusan IZIN	Proses Hukum	
Kota Jayapura	2	-	10	-	-	Seluruh perangkat hasil penertiban diamankan ke Kantor Balmon Jayapura
Kabupaten Mimika	5	-	14	-	-	Seluruh perangkat hasil penertiban diamankan ke Kantor Balmon Jayapura

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura di sepanjang tahun 2019 terealisasi sebanyak 2 kali dan kepada Target Operasi diberikan beberapa tindak lanjut Operasi Penertiban yaitu surat peringatan, bagi radio yang tidak digunakan lagi dan masih terdapat beberapa pengguna radio yang tetap mengudara tanpa ISR.

Bagi Pengguna yang masih mengudara tanpa ISR, dilakukan tindakan segel dan dilanjutkan membuat Surat Pernyataan / Berita Acara Komitmen untuk mengurus ISR dengan batas waktu. Apabila tidak dilakukan pengurusan dalam batas waktu tersebut maka pihak pengguna (penyelenggara) dengan suka rela menyerahkan alatnya (Radio) untuk dimusnahkan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dalam pelaksanaan penertiban lebih mengutamakan pembinaan atau edukasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah diselesaikan 100% dari target 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai melebihi target yaitu 117,65%.

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi Dengan Data ISR

a. Latar Belakang Kegiatan

Inspeksi Stasiun Radio secara umum adalah kegiatan untuk melakukan pencocokkan data antara data SIMS dengan data yang ada di lapangan. Indikator kinerja untuk kegiatan ini diukur dari banyaknya Stasiun Radio yang memiliki kesesuaian data antara data SIMS dan data lapangan dari jumlah total Stasiun Radio yang dilakukan Sampling.

b. Indikator kinerja Presentase (%) kesesuaian data hasil Inspeksi dengan data ISR memiliki target realisasi sebesar 81%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan Inspeksi data Frekuensi Radio sejumlah 7 (tujuh) kali di wilayah Papua dengan hasil yang diperoleh sejumlah 225 sampel. Dari

hasil Inspeksi sepanjang tahun 2019 Indikator Kinerja persentase (%) Kesesuaian data hasil Inspeksi dengan data ISR tercapai sebesar 79.56%.

Capaian hasil data kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	79.56%

Dari capaian indikator kinerja di atas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2019

No	Nama Pemegang ISR	Data ISR Yang Diinspeksi (Sampling)	Hasil Inspeksi				Tindak Lanjut Hasil Inspeksi		Capaian (% Valid)
			Stasiun Radio Aktif		Stasiun Radio Tidak Aktif (Off-Air)	Proses ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	
			Sesuai ISR	Tidak Sesuai ISR					
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	BADAN SAR NASIONAL	15	0	9	5	1	15	0	100.00%
2	DINAS KESEHATAN KAB. MIMIKA	6	0	6	0	0	6	0	100.00%
3	DINAS KOMINFO KAB. MIMIKA	6	0	6	0	0	6	0	100.00%
4	GRAHA SARANA BUANA PT. (CABANG MIMIKA)	1	0	0	1	0	1	0	100.00%
5	GRAND TEMBAKA HOTEL MIMIKA PAPUA, PT.	2	0	2	0	0	2	0	100.00%
6	HOTEL EMERALD	1	0	0	0	1	1	0	100.00%
7	HOTEL HORISON TIMIKA	1	0	0	0	1	1	0	100.00%
8	PANCA DUTA KARYA ABADI PT. CAB. SORONG	2	1	1	0	0	1	0	100.00%

9	PERTAMINA PT (PERSERO)	2	2	0	0	0	0	0	100.00%
10	PETROSEA, PT.	8	0	4	3	1	8	0	100.00%
11	SRIWIJAYA AIR, PT.	3	2	0	0	1	1	0	100.00%
12	TIMIKA MAKMUR JAYA SENTOSA, PT.	11	4	0	7	0	7	0	100.00%
13	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, PT – RADIO BACKHAUL	57	50	7	0	0	0	7	87.72%
14	TELEKOMUNIKASI SELULER, PT.	60	31	11	0	18	0	29	51.67%
15	INDOSAT TBK, PT.	20	10	4	6	0	0	10	50.00%
16	XL AXIATA, TBK	15	10	0	1	4	5	0	100.00%
17	DERAYA, PT.	2	0	2	0	0	2	0	100.00%
18	YAYASAN PELAYANAN PENERBANGAN TARIKU	3	3	0	0	0	0	0	100.00%
19	JAYAWIJAYA DIRGANTARA, PT.	1	0	1	0	0	1	0	100.00%
20	SINAR CEMERLANG ANEKA, PT.	2	0	2	0	0	2	0	100.00%
21	YAYASAN JAYA AVIASI INDONESIA	3	0	3	0	0	3	0	100.00%
22	ARTAMAKMUR PERMAI, PT.	3	2	1	0	0	1	0	100.00%
23	PUSAKA DEWA KRESNA, PT.	1	1	0	0	0	0	0	100.00%
TOTAL		225	116	59	23	27	63	46	79,56%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspeksi data Frekuensi Radio di Wilayah Papua sejumlah 7 kali kegiatan dengan hasil 225 sampel terdiri dari 116 sampel sesuai ISR, 59 sampel tidak sesuai ISR, 23 sampel off air dan 27 sampel tidak memiliki ISR. Dari keseluruhan sampel, sebanyak 63 sampel sudah ditindaklanjuti dan sebanyak 46 sampel yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan di atas, di ketahui bahwa sepanjang tahun 2019, indikator “Persentase (%) Kesesuain Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR” telah diselesaikan sebesar 79.56% dari target 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target belum tercapai.

6. IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR Dan Alat Monitor/Ukur UPT.

a. *Transportable*

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur unit transportable yang terpasang di Wilayah kerja UPT Jayapura yaitu dengan target perjanjian kerja 83%. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat. Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas II Jayapura juga melakukan inspeksi perangkat SMFR transportable di empat lokasi yaitu di site Sentani di Kabupaten Jayapura, site Nabire di Kabupaten Nabire Site Wamena di Kabupaten Jayawijaya dan site Biak di Kabupaten Biak Numfor. Dengan demikian Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT tercapai sesuai target.

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur memiliki target realisasi sebesar 83% . Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar 90%, sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 108.43%. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	83%	90%	108.43 %

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat dikami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut : **Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator** “Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat

monitor/ukur di UPT” telah terjadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai 90%.

7. IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST Dan ISR Oleh UPT

Untuk Wilayah Papua Balai Monitor Kelas II Jayapura s.d bulan Desember 2018 telah mendistribusikan SPP sebanyak 109 , ST sebanyak 69 dan ISR sebanyak 12.

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%)Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT” telah didistribusikan sejumlah ISR yang diterbitkan,sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

8. IK-8 Persentase (%) Terlaksananya UNAR

UNAR merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi dalam rangka untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR), Setelah mendapatkan IAR, kemudian para pegiat amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan

tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku. Para peserta UNAR mendaftarkan diri *secara online* melalui **Sistem Aplikasi E-Licensing Amatir Radio** dan membayar biaya ujian secara host to host melalui bank mitra Ditjen SDPPI.

Pelayanan e-Licensing Amatir Radio merupakan bukti komitmen Ditjen SDPPI dalam memberikan pelayanan secara transparan, cepat, akurat, dan akuntabel, kepada masyarakat. Pelayanan e-Licensing Amatir Radio telah diterapkan Ditjen SDPPI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah di Indonesia sejak 2017 lalu. Tahun ini, pelayanan online itu diharapkan bisa diterapkan merata di semua UPT.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura untuk tahun 2019 telah merencanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan keduanya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Wilayah Papua untuk Tahun 2019 berjumlah 145 peserta dengan Tingkat Siaga sebanyak 123 peserta, Tingkat Penggalang 21 peserta dan tingkat penegak sebanyak 1 peserta.

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 %. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%)Pelaksanaan UNAR” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melakukan kegiatan berupa :

1. Kegiatan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio
2. Kegiatan Layanan Administrasi Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan

1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Pengelolaan atau manajemen spektrum frekuensi radio dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai administrator di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah memberikan kontribusi terhadap keuangan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio).

Terdapat 3 (tiga) jenis izin penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu :

1. Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)
IPFR adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti IPFR untuk keperluan jaringan telekomunikasi seluler dan wireless broadband.
2. Izin Stasiun Radio (ISR)
ISR adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu, seperti ISR untuk keperluan Microwave Link, radio trunking, radio konvensional, penyiaran, satelit, maritim dan penerbangan.
3. Izin Kelas (class license)
Izin Kelas adalah hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis. Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas

tidak diperlukan ISR, namun harus menggunakan perangkat yang telah disertifikasi oleh Ditjen SDPPI, seperti penggunaan frekuensi radio untuk wireless broadband Pita 2.4/5.8 GHz (Wifi 2.4/5.8 GHz), *Short-Range Devices*, dan perangkat dengan daya pancar maksimum 10 mWatt.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 2 kali yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Indikator Kinerja **Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio** memiliki target sebesar 100%. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100 %. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan ditahun 2019 sehingga presentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di wilayah Papua yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- Perencanaan dan program
- Penatausahaan dan rumah tangga
- Kepegawaian
- Pelaksanaan anggaran

B

PERENCANAAN DAN PROGRAM

Pada tahun 2019 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebesar Rp. 8.590.042.000,- Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura adalah:

No.	Uraian	Pagu
1	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	Rp.1.008.408.000,-
	1. Observasi dan Monitoring radio bergerak dalam kota	Rp.6.869.000,-
	2. Observasi Dan Monitoring frekuensi radio bergerak luar kota menggunakan transportasi darat (Papua)	Rp.30.611.000,-
	3. Observasi Dan Monitoring frekuensi radio bergerak luar kota menggunakan transportasi udara (papua)	Rp.328.360.000,-
	4. Observasi Dan Monitoring frekuensi radio bergerak luar kota menggunakan transportasi udara dan laut(papua)	Rp.83.100.000,-
	5. Operasi penertiban frekusensi radio dalam kota (papua)	Rp.18.776.000,-
	6. Operasi penertiban frekuensi radio luar kota (papua)	Rp.122.130.000,-
	7. Inspeksi Dalam Rangka validasi Data Izin Stasiun Radio Dalam Kota (Papua)	Rp.7.194.000,-
	8. Inspeksi Dalam Rangka validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi Darat (papua)	Rp.15.945.000
	9. Inspeksi Dalam Rangka validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi udara (Papua)	Rp.86.500.000,-
	10. Inspeksi Dalam Rangka validasi Data Izin Stasiun Radio Luar Kota Menggunakan Transportasi udara dan laut (Papua)	Rp.35.400.000
	11. Pengukuran frekuensi radio dalam kota (papua)	Rp.6.430.000,-
	12. Pengukuran frekuensi radio bergerak luar kota	Rp.83.600.000,-
	13. Tindak lanjut hasil penertiban dalam kota (papua)	Rp.7.402.000,-
	14. Tindak lanjut hasil penertiban luar kota (papua)	Rp.63.532.000
	15. Ujian negara amatir radio dalam kota (papua)	Rp.29.525.000
	16. Ujian negara amatir radio luar kota (papua)	Rp.60.421.000
	17. Pengukuran frekuensi radio luar kota menggunakan transportasi darat (papua)	Rp.22.613.000
2	Penyelesaian Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Balmon Kelas II Jayapura, terdiri dari :	Rp.62.456.000,-
	1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota	Rp.7.402.000,-
	2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota	Rp.55.054.000,-
3	Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :	Rp.1.896.290.000,-
	1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)	Rp.520.880.000,-
	2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi	Rp.1.126.895.000,-
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp.124.605.000,-
	4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan	Rp.123.990.000,-
4.	Layanan Internal (Overhead)	Rp.221.365.000,-
	1. Peralatan dan fasilitas perkantoran	Rp.188.865.000,-
	2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.32.500.000,-
5.	Layanan Perkantoran	Rp.5.401.523.000,-
	1. Gaji dan Tunjangan	Rp.2.334.507.000,-
	2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.3.067.016.000,-

1. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran Pemerintah Propinsi Papua, Jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Papua serta para Penyelenggara/pengguna Spektrum Frekuensi Radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 451 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 438 surat.
- Surat Perintah Tugas sebanyak 170 surat.

Rumah Tangga

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, Dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktual Tahun 2019

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Kontrak	Tanggal	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Pengadaan
1	Sewa Jaringan Internet	01/PPK-NET/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/I/2019	18 Januari 2019	387.728.004	e-Purchasing
2	Pemanfaatan Lahan dan/ atau Ruangan milik PT POS Indonesia (Persero) untuk Penempatan dan Pengoperasian Sistem Monitoring Frekuensi Radio	04/PPK/DJSDPPI/BMJ/02/2019	07 Februari 2019	140.553.600	Penunjukkan Langsung

	Transportable				
3	Pemeliharaan Halaman	05/PPK-PH/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/IV/2019	23 April 2019	79,000,000	Pengadaan Langsung
4	Pemeliharaan Gedung	07/PPK-PG/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/VII/2019	18 Juli 2019	197,838,000	Pengadaan Langsung
5	Pemeliharaan Tower	07/PPK-TOWER/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/VIII/2019	02 Agustus 2019	70,100,000	Pengadaan Langsung
6	Pengadaan Alat Pengolah Data	08/PPK-APG/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/VIII/2019	16 Agustus 2019	69,186,500	e-Purchasing
7	Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Mess	10/PPK-CAT-BK/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/X/2019	04 Oktober 2019	198,500,000	Pengadaan Langsung
8	Pengadaan Alat Komunikasi	12/PPK-ALKOM/BMJ/DJSDPPI/KOMINFO/XI/2019	04 November 2019	113,250,000	Pengadaan Langsung

Daftar BMN Sampai Dengan Tahun 2019

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Stationary Generating Set	Unit	4	4	0
Mini Bus (penumpang 14 orng kebawah)	Unit	8	8	0
Sepeda Motor	Unit	3	3	0
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	2	2	0
Battery Charge	Buah	4	4	0
Audio Sweep Osilator	Buah	1	0	1
Spektrum Analyzer	Buah	6	6	0
Global Positioning System	Buah	3	3	0
Log Periodic Antenna	Buah	2	2	0
Calibration Level Generator	Buah	1	0	1
Analyzer Spektrum Display	Buah	1	0	1

Frequency Counter (Universal Tester)	Buah	3	3	0
Lemari Besi/Metal	Buah	10	10	0
Lemari Kayu	Buah	7	7	0
Rak Besi	Buah	6	6	0
Filing Cabinet Besi	Buah	8	8	0
Brandkas	Buah	4	4	0
Tabung Pemadam Api	Buah	11	11	0
CCTV - Camera Control Television System	Unit	15	11	4
White Board	Buah	2	2	0
Mesin Absensi	Buah	1	1	0
Penangkal Petir	Buah	2	2	0
LCD Projector/Infocus	Buah	1	1	0
Panic Button System, Alarm Indicator	Buah	8	4	4
Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	1	0
Papan Gambar	Buah	1	1	0
Perkakas Kantor Lainnya	Buah	1	1	0
Meja Kerja Kayu	Buah	39	39	0
Kursi Besi/Metal	Buah	96	86	10
Sice	Buah	3	3	0
Meja Rapat	Buah	1	1	0
Meja Komputer	Buah	10	10	0
Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	15	15	0
Lemari Es	Buah	2	2	0
A.C. Sentral	Buah	2	2	0

A.C. Split	Buah	29	29	0
Televisi	Buah	8	8	0
Loudspeaker	Buah	6	6	0
Sound System	Buah	1	1	0
Unit Power Supply	Buah	3	2	1
Stabilisator	Buah	4	4	0
Gordyin/Kray	Buah	3	3	0
Kabel Roll	Buah	2	2	0
Kabel	Buah	2	2	0
Lampu	Buah	3	2	1
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	11	10	1
Power Amplifier	Buah	1	1	0
Receiver HF/LF	Buah	1	1	0
Lighting Stand Tripod	Buah	2	2	0
Slide Projector	Buah	1	1	0
LCD Monitor	Buah	1	1	0
VTR Recorder	Buah	4	4	0
RF Cable	Buah	5	5	0
Kamera Stile	Buah	2	2	0
GPS Receiver	Buah	1	1	0
Telephone (PABX)	Buah	1	1	0
Facsimile	Buah	2	1	1
Radio Link	Buah	8	8	0
Peralatan Antena HF/SW Lainnya	Buah	2	2	0
Peralatan Antena UHF Lainnya	Buah	2	2	0

Mast Tower	Buah	1	1	0
Lightning Protector	Buah	16	10	6
All Band Receiver	Buah	10	7	3
Peralatan Antena Penerima VHF	Buah	3	3	0
Peralatan Antena Penerima UHF	Buah	3	3	0
Peralatan Antena Penerima VHF Lainnya	Buah	4	4	0
Unit Transceiver HF Portable	Buah	1	1	0
Gyro Compass	Buah	1	1	0
Radio Direction Finder	Buah	2	2	0
Unit Antena Transceiver SHF Portable	Buah	6	6	0
Genset	Buah	3	3	0
Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	3	3	0
Local Area Network (LAN)	Buah	1	1	0
Internet	Buah	1	1	0
Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	1	0
P.C Unit	Buah	36	32	4
Lap Top	Buah	28	24	4
Note Book	Buah	9	9	0
Hard Disk	Buah	1	1	0
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2	0
Monitor	Buah	7	4	3
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	22	4
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	7	1
Server	Buah	2	2	0
Router	Buah	16	13	3

Hub	Buah	5	4	1
Rak Server	Buah	7	7	0
Switch	Buah	4	4	0

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Balmon Kelas II Jayapura, didukung sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan tugas-tugas dimaksud antara lain :

➤ **Kantor Balai Monitor Kelas II Jayapura**

Lokasi Balai Monitor Kelas II Jayapura terletak di: Jl. Raya Sentani No. 21 Pdg.Bulan, Abepura-Jayapura – 99351 Kel. Hedam Kec. Heram, Kota Jayapura dengan luas tanah 1.500 m² dan 3.102 m² ,Yang berfungsi sebagai Kantor Balmon Kelas II Jayapura.

➤ **Tanah Yang Diperuntukkan Untuk Rumah Dinas**

Balai Monitor Kelas II Jayapura memiliki sebidang tanah yang digunakan sebagai rumah dinas dengan luas tanah 220 m² yang terletak di Kelurahan VIM Jalan Kompleks BTN SKY LINE INDAH Kotaraja Kecamatan Jayapura Selatan , Kota Jayapura – Papua.

2. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki sumber daya manusia sejumlah 17 pegawai negeri sipil (PNS), 2 Calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 16 pegawai kontrak

➤ *Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala*

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat 6 (enam) pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 3 (tiga) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP) secara reguler, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas II Jayapura

NO.	NAMA / NIP	GOL.	TMT	MASA KERJA (Tahun)
1	ANSAR KALUKU 196607261990031003	III/d	1-3-2019	24
2	ANUGRAH AGUNG PERDANA 198407222011011006	III/c	1-1-2019	8
3	ZAINAL ASRI 198605282009011005	III/a	1-1-2019	8
4	ARFAN TRINO LESMANA 19851103201101011	II/d	1-1-2019	12
5	MISKUN 197304262007011004	II/c	1-1-2019	17
6	CRISTIE SHINTIA MERAUJE 198605052015062001	II/c	1-6-2019	7

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas II Jayapura

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	ANUGRAH AGUNG PERDANA 198407222011011006	III/b ke III/c	1-04-2019	8 tahun 3 bln
2	ARFAN TRINO LESMANA 19851103201101011	II/d ke III/a	1-4-2019	6 tahun 3 bln
3	CRISTIE SHINTIA MERAUJE 198605052015062001	II/c ke II/d	1-10-2019	7 tahun 4 bln

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2019

TAHUN	USIA			
2019	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	3	5	8	2

➤ Pejabat Pengendali

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura

NO.	FUNGSIONAL	2019
1	Pengendali Frekuensi Radio Muda	0
2	Pengendali Frekuensi Radio Pertama	2
3	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	1
4	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan	1
5	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana	1
Jumlah		5

➤ PPNS

NO.	NAMA / NIP.	GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	NIKOLAS, ST. 196811081989031003	IV/a	Kabalmon	PPNS Pusat
2	RACHIM PRIBADI, S.E,M.M 197408051993031001	III/d	Kepala Seksi Pantib	PPNS Pusat (Mutasi ke Loka Mamuju)
3	ANSAR S.T. 198107022009011007	III/d	Pengelola Data Pantib	PPNS Pusat (Mutasi ke Balmon Palu)
4	RABIT 196307161989031004	III/c	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	PPNS Pusat
5	KHAIRIANSYAH,S.H. 197410042009121001	III/d	Kepala Seksi Sarpel	PPNS Pusat
6	ZAINAL ASRI,S.T 198605282009011005	III/a	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Utama	PPNS Pusat

➤ Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pegawai, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menugaskan pegawai untuk menghadiri/mengikuti undangan, diklat, bimtek, workshop, dan sebagainya, yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi & Informatika RI, Ditjen Sumber Daya Dan Perangkat Pos

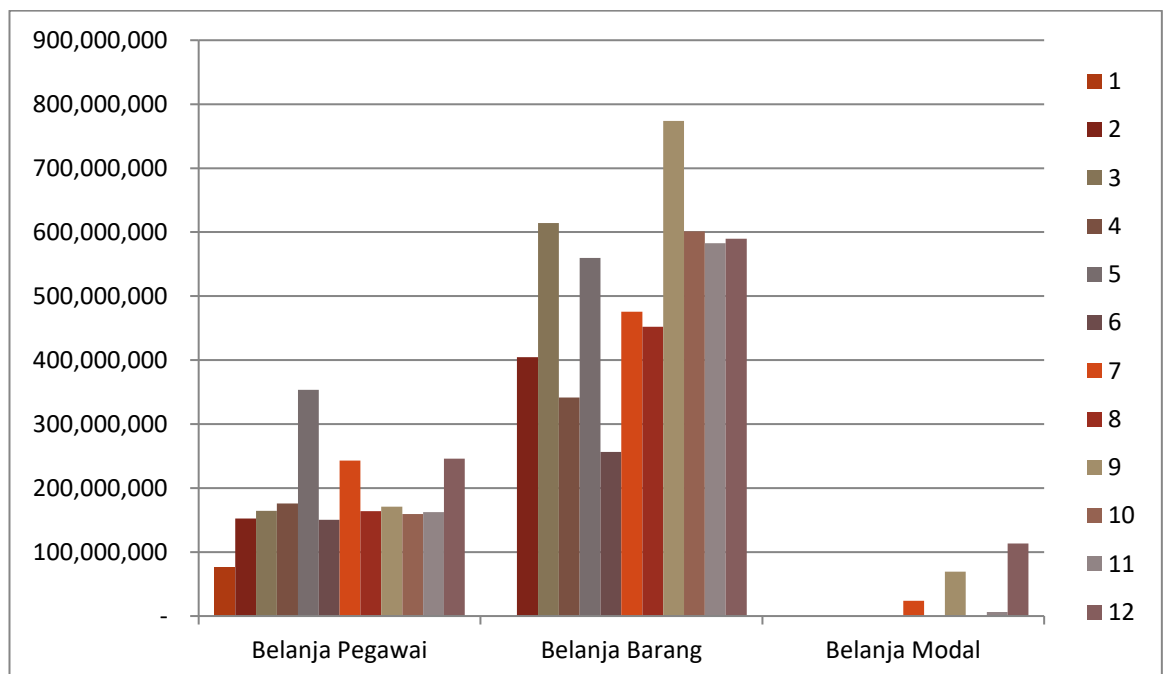
Dan Informatika, ataupun instansi lainnya. Sehingga diharapkan agar setiap pegawai memiliki kemampuan atau kompetensi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan secara profesional.

3. Pelaksanaan Anggaran

Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun anggaran 2019 sesuai DIPA No. 059.03.2.613502/2018 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp.8.590.042.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni Rp. 3.855.203.000,- dan PNB RP. 4.734.839.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2019 mengalami revisi sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi Kanwil Jayapura dan 1 kali berupa revisi DJA.

Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (disbursement plant) tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan mei untuk belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ke 13 dan tunjangan hari raya, sementara pada belanja barang penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Agustus dikarenakan operasional perkantoran yang meningkat.

4. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura semula berjumlah sebesar Rp.**8.590.042.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **8.083. 521.097,-** atau **94,10%**. Berikut realisasi anggaran tahun 2019, yaitu:

URAIAN	Periode 31 Desember 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	2.334.507.000	2.218.103.195	95,01
Belanja Barang	6.034.170.000	5.652.411.402	93,67
Belanja Modal	221.365.000	213.006.500	96,22
Total Belanja	8.590.042.000	8.083.521.097	94,10

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2019, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Monitor Kelas II Jayapura tahun 2019 telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Berdasarkan penyerapan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun 2018 ini telah terelealisasi sebesar Rp. 8.083.521.097,- atau sebesar **94.10 %**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun 2019 ini di buat sebagai evaluasi kinerja dan juga sebagai indikator dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi di tahun yang akan datang.

Terima Kasih